



Apakah Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Efektif sebagai Instrumen Pembangunan untuk Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi?

Is the Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Effective as a Development Instrument to Improve Access to Higher Education?

Ramadhana Aulia Wisdawati¹, Muhammad Hanafi²

¹Politeknik Caltex Riau, Jurusan Bisnis dan Komunikasi, Pekanbaru, Riau, Indonesia

²Universitas Andalas, Departemen Ekonomi, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Email: ramadhana@pkr.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 28 Juli 2025

Accepted: 01 Januari 2026

Published: 07 Januari 2026

Keywords: *indonesia smart card; education participation; higher education; human resource*

DOI: [10.37859/jae.v15i2.9839](https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9839)

JEL Classification: I28, 015, H52

Abstrak

Kartu Indonesia Pintar (KIP) berperan penting dalam mendukung upaya pemerintah memperluas akses pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran KIPK serta faktor lainnya dalam mendorong partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Data yang digunakan berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022. Analisis dilakukan dengan metode regresi logistik untuk mengidentifikasi pengaruh berbagai variabel terhadap partisipasi pendidikan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan KIPK dan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh signifikan dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Temuan ini menegaskan pentingnya peran bantuan sosial dalam mendorong akses pendidikan lanjutan bagi kelompok rentan.

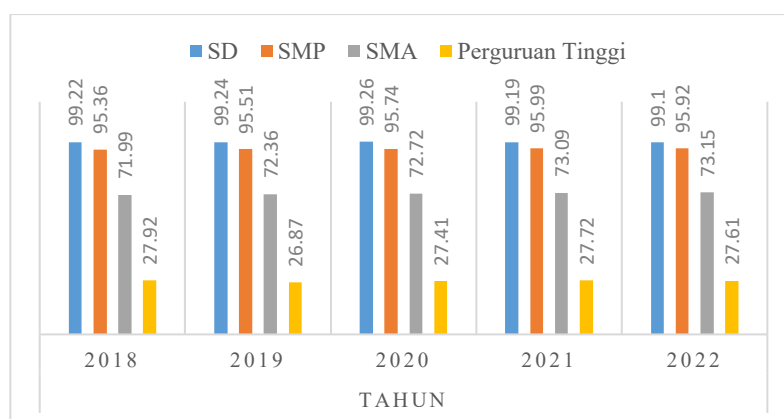
The Indonesia Smart Card (KIP) plays an important role in supporting the government's efforts to expand access to education for students from low-income families. This study aims to evaluate the role of KIPK and other factors in promoting higher education participation in Indonesia. The data used were obtained from the 2022 National Socio-Economic Survey (Susenas). The analysis was conducted using logistic regression to identify the influence of various variables on higher education participation. The results show that ownership of KIPK and assistance from the Family Hope Program (PKH) significantly contribute to increasing higher education participation. These findings highlight the importance of social assistance programs in promoting access to higher education for vulnerable groups.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan sumber daya manusia sehingga mampu mendorong kemajuan suatu negara (Yusup et al., 2019). Pendidikan sebagai pilar utama perubahan berfungsi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat. Negara yang ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat harus memulai dengan memperbaiki sistem pendidikan yang sesuai dengan tuntutan zaman, dengan tujuan agar individu yang dihasilkan memiliki kompetensi yang unggul (Nikmah et al., 2020)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 2 menekankan pentingnya pendidikan nasional yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesadaran politik, hukum, serta kepedulian terhadap lingkungan. Meskipun alokasi anggaran pendidikan telah diupayakan hingga 20% dari APBN, ketimpangan pendidikan antar kelompok masyarakat tetap ada. Rumah tangga dengan kondisi finansial yang lebih baik umumnya memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih tinggi, sementara mereka yang kurang mampu seringkali terhambat oleh biaya pendidikan yang tinggi (Mulyani et al., 2023). Salah satu ukuran utama untuk menilai partisipasi pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS), yaitu proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Sekolah di Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Gambar 1 menunjukkan tingkat partisipasi sekolah selama 2018-2022. Partisipasi di SD sangat tinggi dan konsisten di atas 99%, sedangkan partisipasi SMP juga stabil di kisaran 95%-96% dengan sedikit peningkatan pada 2021 dan 2022. Untuk jenjang SMA, terdapat tren peningkatan dari 71,99% pada 2018 menjadi 73,15% pada 2022, menunjukkan adanya perbaikan akses atau kesadaran akan pentingnya pendidikan menengah. Namun, tingkat partisipasi di perguruan tinggi relatif stagnan di kisaran 27%-28%, mengindikasikan tantangan besar dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi.

Tingkat partisipasi yang rendah dalam pendidikan perguruan tinggi di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan ekonomi, ketidakmerataan akses pendidikan, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan tinggi. Banyak keluarga di Indonesia yang masih menghadapi kondisi ekonomi yang sulit, sehingga biaya pendidikan dan kebutuhan hidup menjadi hambatan yang signifikan (Nurokhmah, 2021). Selain faktor ekonomi, partisipasi dalam pendidikan tinggi turut dipengaruhi oleh karakteristik sosial ekonomi keluarga. Anak-anak dari Kepala rumah tangga yang berpendidikan tinggi biasanya lebih berpeluang untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan rumah tangga dengan kondisi ekonomi terbatas atau anggota keluarga yang banyak sering menghadapi hambatan dalam mendukung pendidikan anak-anak mereka (Utami & Wicaksono, 2019). Faktor yang

mempengaruhi tingkat partisipasi pendidikan termasuk jumlah anggota rumah tangga, yang berhubungan negatif dengan ketersediaan sumber daya untuk pendidikan (Tullao & Rivera, 2011). Rumah tangga yang lebih besar cenderung memiliki lebih banyak individu yang berhenti sekolah, meskipun peningkatan jumlah anak juga dapat mengurangi tanggung jawab pada setiap anak. Selain itu, tingkat kesejahteraan rumah tangga berpengaruh signifikan, dengan partisipasi pendidikan yang lebih tinggi terlihat pada keluarga dengan kesejahteraan lebih tinggi, meskipun biaya pendidikan tetap menjadi beban meskipun ada penghapusan biaya SPP. Karakteristik tempat tinggal juga berperan, dengan lebih banyak penduduk bersekolah di perkotaan. Dari sisi gender, persentase perempuan yang bersekolah cenderung lebih tinggi meskipun tidak signifikan (Mulyani et al., 2023)

Partisipasi sekolah merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem pendidikan di suatu negara. Di Indonesia, meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah diluncurkan, angka putus sekolah masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Salah satu permasalahan yang juga dihadapi Indonesia saat ini adalah rendahnya partisipasi individu dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Upaya untuk mendorong peningkatan partisipasi dalam pendidikan tinggi dengan menghadirkan mekanisme yang lebih modern melalui KIP-Kuliah, program ini diharapkan mampu memberikan dukungan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Melalui integrasi antara program PIP dan KIP Kuliah, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan, yang memberi kesempatan yang adil bagi setiap anak untuk meraih pendidikan yang berkualitas tanpa terbatas oleh kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, kedua program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia.

Namun, partisipasi pendidikan tinggi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan bantuan pendidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kondisi ekonomi keluarga, lokasi geografis, dan tingkat pendidikan orang tua. Kondisi ideal yang diharapkan adalah setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi tanpa dibatasi oleh latar belakang sosial ekonomi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada KIP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah atau menilai efektivitas bantuan pendidikan secara deskriptif, penelitian ini secara khusus memusatkan perhatian pada Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagai instrumen kebijakan pendidikan tinggi. Penelitian ini tidak hanya menilai keberadaan KIP-K, tetapi juga menganalisis pengaruhnya terhadap peluang individu melanjutkan pendidikan tinggi dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara simultan, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih komprehensif dalam memahami peran KIP-K dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan dipandang sebagai investasi yang memberikan keuntungan ekonomi di masa depan (Becker, 2024). Partisipasi pendidikan dapat diukur melalui indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang menunjukkan keterlibatan penduduk usia sekolah dalam pendidikan formal (BPS, 2022). Partisipasi pendidikan tinggi menjadi penting karena terkait dengan peningkatan kualitas SDM, inovasi, serta peluang kerja yang lebih baik. Pemerintah meningkatkan akses pendidikan tinggi melalui bantuan biaya, beasiswa, dan kebijakan afirmatif.

Partisipasi pendidikan dipengaruhi oleh faktor infrastruktur pendidikan, kondisi ekonomi, dan karakteristik rumah tangga. Akses sekolah yang terbatas di wilayah pedesaan menyebabkan rendahnya partisipasi (Kilburn et al., 2017). Pendidikan orang tua, ukuran rumah tangga, serta kondisi ekonomi terbukti memengaruhi keputusan keluarga dalam menyekolahkan

anak (Maralani, 2008). Studi lain menunjukkan perbedaan preferensi gender dan keterlibatan anak dalam pekerjaan turut memengaruhi kelanjutan Pendidikan (Kruger et al., 2007)

Intervensi pemerintah mencakup pendanaan, pengaturan, dan penyediaan layanan pendidikan untuk menjamin akses yang adil. Program seperti BOS, PIP, PKH, dan CCT dirancang untuk mengurangi hambatan biaya dan meningkatkan partisipasi sekolah. Berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa bantuan seperti JPS, BSM, dan PIP dapat menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan, meskipun dampaknya bervariasi antar jenjang.

KIP melalui Program Indonesia Pintar (PIP) memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa dari keluarga miskin untuk memastikan kelanjutan pendidikan. PIP mencakup PIP Dikdasmen dan PIP Pendidikan Tinggi (KIP-K). Pada jenjang perguruan tinggi, KIP-K menanggung UKT dan memberikan bantuan biaya hidup bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu (Sariri & Prabawati, 2024). Program ini bertujuan memutus kemiskinan struktural dan meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi (Rohmah & Kasmawanto, 2022).

Penelitian terdahulu secara umum menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dipengaruhi oleh interaksi antara karakteristik individu, karakteristik rumah tangga, serta kondisi sosial ekonomi. Okumu et al. (2008) menemukan bahwa pendidikan orang tua, jumlah anggota rumah tangga, dan kondisi ekonomi keluarga sangat menentukan risiko putus sekolah. Temuan tersebut sejalan dengan studi Tullao & Rivera (2011) yang menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya dalam rumah tangga berpengaruh besar terhadap keputusan pendidikan anak. Temuan penelitian di Indonesia menunjukkan pola yang sejalan Mulyani et al. (2023) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan kepala rumah tangga meningkatkan kemungkinan anak melanjutkan sekolah. Selain itu, faktor lokasi juga berperan, di mana anak-anak yang tinggal di wilayah perkotaan memiliki peluang pendidikan lebih tinggi karena akses terhadap infrastruktur pendidikan yang lebih memadai. Dampak bantuan sosial terhadap partisipasi pendidikan menunjukkan hasil yang bervariasi, namun secara umum program seperti PKH dan PIP dapat mengurangi hambatan biaya dan menekan angka putus sekolah (Setyadharma, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terhadap tingkat partisipasi dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, yang melibatkan analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menggambarkan karakteristik sampel serta distribusi variabel utama. Sementara itu, analisis statistik inferensial menggunakan metode regresi logistik untuk mengevaluasi hubungan antara partisipasi dalam KIP dengan tingkat partisipasi di pendidikan tinggi. Untuk memastikan hasil estimasi yang akurat dan meminimalkan bias, model ini juga menyertakan variabel kontrol seperti latar belakang sosial ekonomi, lokasi geografis, serta faktor-faktor lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan data *cross-section* dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2022. Data yang dianalisis berasal dari level individu, dengan sampel yang mencakup individu berusia 19-23 tahun.

Penelitian ini menetapkan partisipasi pendidikan sebagai variabel dependen, yang merepresentasikan persentase penduduk usia 19–23 tahun yang sedang menempuh pendidikan tinggi. Variabel ini diberi kode 1 bagi individu yang bersekolah dan 0 bagi yang tidak. Variabel independen utamanya adalah status penerimaan Kartu Indonesia Pintar (KIP-K), dengan kode 1 untuk penerima dan 0 untuk nonpenerima. Selain variabel utama, studi ini juga memasukkan sejumlah variabel kontrol guna memperoleh hasil analisis yang lebih tepat. Variabel kontrol tersebut meliputi: jenis kelamin anak (1 untuk laki-laki, 0 untuk perempuan), status perkawinan kepala rumah tangga (1 jika menikah, 0 jika bercerai), usia kepala rumah tangga (1 untuk ≤ 64

tahun, 0 untuk >64 tahun), jenis kelamin kepala rumah tangga (1 laki-laki, 0 perempuan), serta jumlah anggota rumah tangga (1 jika ≤ 4 orang, 0 jika lebih dari 4). Pendidikan kepala rumah tangga juga turut dikendalikan (1 untuk pendidikan minimal SMA, 0 untuk di bawah SMA), demikian pula klasifikasi wilayah tempat tinggal (1 untuk perkotaan, 0 untuk pedesaan). Status pekerjaan kepala rumah tangga (1 bekerja, 0 tidak bekerja) serta penerimaan bantuan sosial lain di luar PIP, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) (1 penerima, 0 bukan penerima), juga dimasukkan sebagai variabel kontrol. Variabel-variabel ini digunakan untuk mengisolasi pengaruh KIP terhadap partisipasi pendidikan tinggi dengan mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan regresi logistik diterapkan untuk menganalisis sejauh mana penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) memengaruhi partisipasi anak dalam pendidikan. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristik variabel penelitian yang berbentuk dummy, di mana setiap variabel dinyatakan dalam nilai biner (1 atau 0). Model analisis regresi logistik yang digunakan dijelaskan melalui persamaan yang merujuk pada Hosmer et al. (2013)

$$partisipasipddkn = \ln[\pi/(1 - \pi)] = \beta_0 + \beta_1kip + \beta_2jkanak + \beta_3kwnkrt + \beta_4umurkrt + \beta_5jkkrt + \beta_6jart + \beta_7pendidikankrt + \beta_8wilayah + \beta_9statuskerjakrt + \beta_{10}pkh + \varepsilon$$

Tahapan analisis data menggunakan regresi logistik meliputi beberapa langkah utama. Pertama, uji kelayakan model atau *goodness of fit* dilakukan untuk memastikan kesesuaian model dengan data yang diamati. Uji ini menggunakan statistik chi-square, dengan hipotesis nol (H_0) diterima jika probabilitas > 0,05, yang menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan antara prediksi model dan data aktual (Hosmer & Lemeshow, 1989). Kedua, koefisien determinasi diukur untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variasi dalam data. Dalam regresi logistik, *pseudo R-squared* digunakan untuk memberikan estimasi tingkat kecocokan model, meskipun interpretasinya berbeda dengan regresi linier. Ketiga, pengujian hipotesis dilakukan uji parsial (T-test) untuk menilai kontribusi masing-masing variabel independen. Variabel independen dianggap signifikan jika nilai probabilitas < 0,05. Terakhir, *odds ratio* dihitung untuk menggambarkan kekuatan hubungan antara variabel independen dan probabilitas kejadian variabel dependen. *Odds ratio* lebih dari 1 menunjukkan peningkatan peluang kejadian, sedangkan kurang dari 1 menunjukkan penurunan (Ghozali, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini memfokuskan analisis pada individu yang sedang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, khususnya dari D3 hingga S1, yang termasuk dalam penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Jumlah total observasi dalam studi ini adalah 2.161 individu dari keluarga miskin yang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, 254 individu merupakan penerima Kartu Indonesia Pintar. Karakteristik penerima program KIP di Indonesia mencakup berbagai elemen demografis dan sosial, memberikan pemahaman menyeluruh tentang profil penerima manfaat dari program ini.

Tabel 1. Karakteristik Individu Penerima Program KIP-K di Indonesia

Karakteristik Individu	Menerima KIP	Tidak Menerima KIP
Jenis Kelamin Anak		
Laki-Laki	11,71 %	88,29 %
Perempuan	5,21 %	94,09 %
Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga		
Kawin	12,24 %	87,76 %
Tidak Kawin	8,17 %	91,83 %
Umur Kepala Rumah Tangga		

≤64 Tahun	12,17 %	87,83 %
>64 Tahun	4,84 %	95,16 %
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-Laki	12,03 %	87,97 %
Perempuan	9,48 %	90,52 %
Jumlah Anggota Rumah Tangga		
>4	8,77 %	91,23 %
≤4	12,55 %	87,45 %
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SMA Keatas	11,95 %	88,05 %
Lainnya	11,57 %	88,43 %
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga		
Bekerja	12,17 %	87,83 %
Tidak Bekerja	7,41 %	92,59 %
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal		
Kota	9,44 %	90,56 %
Desa	12,52 %	92,48 %
Kepemilikan Bantuan Sosial lainnya: PKH		
Menerima PKH	21,49 %	78,51 %
Tidak Menerima	5,01 %	94,99 %

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, data diolah

Tabel 1 menunjukkan distribusi penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang bervariasi berdasarkan karakteristik individu dan rumah tangga. Dari segi jenis kelamin, laki-laki lebih banyak menerima KIP (11,71%) dibandingkan perempuan (5,21%). Berdasarkan status perkawinan, rumah tangga dengan kepala keluarga yang sudah menikah (12,24%) lebih banyak menerima KIP dibandingkan yang belum menikah (8,17%). Dari sisi usia, kepala rumah tangga berusia ≤64 tahun memiliki proporsi penerima lebih tinggi (12,17%) dibandingkan yang berusia >64 tahun (4,84%), menandakan program ini lebih mendukung kelompok usia produktif. Selain itu, kepala keluarga laki-laki (12,03%) lebih banyak menerima KIP dibandingkan perempuan (9,48%). Rumah tangga dengan anggota ≤4 orang lebih tinggi penerimaannya (12,55%) dibandingkan rumah tangga dengan >4 anggota (8,77%). Dari segi pendidikan, kepala keluarga dengan pendidikan SMA ke atas (11,95%) memiliki proporsi penerima yang hampir sama dengan pendidikan lainnya (11,57%). Rumah tangga dengan kepala keluarga yang bekerja (12,17%) juga lebih banyak menerima KIP-K dibandingkan yang tidak bekerja (7,41%). Berdasarkan lokasi, rumah tangga di desa lebih dominan menerima KIP-K (12,52%) dibandingkan di kota (9,44%), menunjukkan fokus program pada daerah pedesaan. Kepemilikan bantuan sosial lain, seperti PKH, memiliki korelasi tinggi dengan penerimaan KIP-K, di mana 21,49% penerima PKH juga menerima KIP-K, jauh lebih tinggi dibandingkan rumah tangga yang tidak menerima PKH (5,01%).

Tabel 2. Karakteristik Partisipasi Pendidikan Tinggi di Indonesia

Karakteristik Individu	Berpartisipasi	Tidak Berpartisipasi
Kartu Indonesia Pintar-Kuliah		
Menerima	97,64%	2,36%
Tidak Menerima	84,58%	15,42%
Jenis Kelamin Anak		
Laki-Laki	87,45%	12,55%
Perempuan	78,12%	15,21%
Status Perkawinan Kepala Rumah Tangga		
Kawin	85,82%	14,18%
Tidak Kawin	88,33%	11,67%

Umur Kepala Rumah Tangga		
≤64 Tahun	86,25%	13,75%
>64 Tahun	83,87%	16,13%
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga		
Laki-Laki	85,80%	14,20%
Perempuan	88,79%	11,21%
Jumlah Anggota Rumah Tangga		
>4	85,53%	14,47%
≤4	86,28%	13,72%
Pendidikan Kepala Rumah Tangga		
SMA Keatas	84,80%	15,20%
Lainnya	87,35%	12,65%
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga		
Bekerja	85,95%	14,05%
Tidak Bekerja	87,83%	12,17%
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal		
Kota	87,78%	12,22%
Desa	85,56%	14,44%
Kepemilikan Bantuan Sosial lainnya: PKH		
Menerima PKH	91,86%	8,14%
Tidak Menerima	82,15%	17,85%

Sumber: Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2022, data diolah

Tabel 2 menampilkan karakteristik partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia yang menunjukkan sejumlah pola penting. Penerimaan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terlihat memberikan pengaruh yang signifikan, di mana mahasiswa penerima KIP-K memiliki tingkat partisipasi jauh lebih tinggi (97,64%) dibandingkan mahasiswa yang tidak memperoleh bantuan tersebut (84,58%). Perbedaan juga tampak pada variabel jenis kelamin, dengan laki-laki mencatat tingkat partisipasi yang lebih tinggi (87,45%) daripada perempuan (78,12%). Status perkawinan kepala rumah tangga tidak menunjukkan variasi yang besar, meskipun kepala rumah tangga yang sudah menikah memiliki tingkat partisipasi sedikit lebih tinggi (85,82%) dibandingkan yang belum menikah (88,33%). Usia kepala rumah tangga pun memperlihatkan perbedaan yang relatif kecil, di mana rumah tangga dengan kepala berusia lebih dari 64 tahun memiliki tingkat partisipasi sedikit lebih rendah (83,87%) dibandingkan rumah tangga dengan kepala yang berusia 64 tahun ke bawah (86,25%). Rumah tangga yang dipimpin oleh perempuan tercatat memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi (88,79%) dibandingkan rumah tangga dengan kepala laki-laki (85,80%). Jumlah anggota rumah tangga tidak menunjukkan perbedaan signifikan, karena tingkat partisipasi hampir sama antara rumah tangga dengan lebih dari empat anggota (85,53%) dan rumah tangga dengan empat anggota atau kurang (86,28%). Variasi kecil juga terlihat pada pendidikan kepala rumah tangga, di mana kepala keluarga dengan pendidikan SMA ke atas justru menunjukkan tingkat partisipasi sedikit lebih rendah (84,80%) dibandingkan mereka yang berpendidikan lebih rendah (87,35%). Perbedaan serupa terlihat pada status pekerjaan kepala rumah tangga, di mana rumah tangga dengan kepala yang bekerja memiliki tingkat partisipasi lebih rendah (85,95%) daripada rumah tangga dengan kepala yang tidak bekerja (87,83%). Dari sisi wilayah, partisipasi pendidikan tinggi lebih tinggi di daerah perkotaan (87,78%) dibandingkan pedesaan (85,56%). Selain itu, kepesertaan dalam program bantuan sosial lain seperti PKH menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan, karena penerima PKH memiliki tingkat partisipasi yang jauh lebih tinggi (91,86%) dibandingkan mereka yang tidak menerima bantuan tersebut (82,15%).

Tabel 3. Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model	
Jumlah observasi	2161
Angka covariate patterns	274
Pearson chi2(263)	281.50
Prob > chi-square	0.2069

Sumber: STATA, data diolah

Tabel 3 menunjukkan hasil uji kelayakan model. Hasil uji menunjukkan probabilitas chi-square sebesar 0.2069, yang lebih besar dari 0.05, sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Dengan demikian, model logistik dapat dianggap layak tanpa indikasi masalah dalam kecocokannya.

Tabel 4. Hasil Odds Ratio

<i>Prob > Chi2</i>			0,0000
<i>Pseudo R2</i>			0,0483
Variabel	Standart error	P-value	Odds Ratio
Kartu Indonesia Pintar Kuliah	2,48854	0,000	5,893014
Jenis Kelamin Anak	0,1609006	0,064	1,265596
Status Perkawinan KRT	0,243276	0,515	0,8253687
Umur Kepala Rumah Tangga	0,2784833	0,786	1,073021
Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga	0,2822095	0,720	0,8927739
Jumlah Anggota Rumah Tangga	0,1569261	0,995	1,001014
Pendidikan Kepala Rumah Tangga	0,1025544	0,093	0,8078987
Klasifikasi Wilayah Tempat Tinggal	0,1978491	0,101	1,28707
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	0,2193781	0,633	0,8889488
Kepemilikan Bantuan Sosial: PKH	0,3046676	0,000	2,083672
Cons_	2,139874		

Sumber: STATA, data diolah

Tabel 4 menyajikan hasil estimasi regresi logistik yang menguji berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi pendidikan tinggi. Berdasarkan estimasi tersebut, variabel yang terbukti berpengaruh signifikan adalah kepemilikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan penerimaan bantuan sosial PKH. Penerima KIP-K memiliki odds ratio sebesar 5,893014 dengan p-value 0,000, yang menandakan bahwa siswa yang memperoleh KIP-K memiliki kemungkinan hampir enam kali lebih besar untuk berpartisipasi dalam pendidikan tinggi. Demikian pula, penerima PKH memiliki odds ratio 2,083672 dengan p-value 0,000, sehingga peluang mereka untuk melanjutkan pendidikan meningkat lebih dari dua kali lipat. Sementara itu, variabel lain seperti jenis kelamin anak, status perkawinan kepala rumah tangga, usia kepala rumah tangga, jenis kelamin kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, klasifikasi wilayah, serta status pekerjaan kepala rumah tangga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan tinggi.

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi individu dari keluarga miskin dalam pendidikan tinggi. Siswa yang menerima KIP-K cenderung lebih mungkin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dibandingkan yang tidak. Program ini terbukti efektif dalam mengurangi hambatan finansial, memungkinkan siswa dari keluarga kurang mampu untuk mengakses pendidikan tinggi dengan lebih mudah. Bantuan KIP-K mencakup biaya pendidikan, transportasi, dan kebutuhan akademik lainnya, mengurangi beban ekonomi keluarga miskin dan meningkatkan fokus siswa pada studi mereka, tanpa perlu bekerja sambil kuliah. Program KIP-K turut berkontribusi dalam

mengurangi tingkat putus sekolah di kalangan masyarakat miskin dan mendorong partisipasi yang lebih tinggi di pendidikan tinggi, yang pada gilirannya mendukung pemerataan pendidikan. Dengan meningkatnya partisipasi pendidikan, dampak jangka panjang diharapkan mencakup peningkatan mobilitas sosial, pengurangan kesenjangan ekonomi, serta peningkatan daya saing di pasar kerja. Program ini bukan hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Indonesia secara keseluruhan. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Nikmah et al. (2020) & Mulyani et al. (2023) yang menegaskan peran penting KIP-K dalam mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan formal. Pemerintah diharapkan terus mengembangkan dan memperluas program ini agar lebih banyak siswa dari keluarga miskin dapat merasakan manfaatnya.

Sejalan dengan pembahasan sebelumnya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan yang diberikan, tetapi juga sangat bergantung pada integrasi sistem data penerima, kualitas tata kelola keuangan, serta keberadaan sistem pendampingan mahasiswa yang berkelanjutan. Putri et al. (2025) menegaskan bahwa tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, efektivitas KIP Kuliah berpotensi hanya bersifat administratif dan belum sepenuhnya menyentuh efektivitas substantif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Temuan ini diperkuat oleh Madani et al. (2025) yang menyatakan bahwa meskipun KIP Kuliah efektif sebagai instrumen peningkatan akses pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, program ini belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pembangunan manusia jangka panjang. Dengan kata lain, KIP-K telah berhasil membuka akses menuju pendidikan tinggi, namun belum sepenuhnya menjamin kualitas dan keberlanjutan capaian pembangunan pendidikan. Martins & Toletina (2024) menekankan bahwa pelaksanaan kebijakan Program KIP-K masih memerlukan evaluasi kebijakan yang menyeluruh, khususnya dalam memastikan ketepatan sasaran, efisiensi pengelolaan, serta ketepatan waktu penyaluran dana. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang berkelanjutan menjadi langkah krusial untuk meningkatkan kualitas implementasi Program KIP-K agar benar-benar mampu mewujudkan tujuan keadilan sosial dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Indonesia

Selain KIP-K, kepemilikan bantuan sosial lainnya memperlihatkan pola yang sejalan. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peluang lebih tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dibandingkan individu yang tidak mendapatkan bantuan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa PKH, sebagai bentuk intervensi sosial, mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap partisipasi pendidikan tinggi, kemungkinan melalui peningkatan kapasitas ekonomi rumah tangga atau pengurangan beban biaya pendidikan. Meskipun demikian, hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Mulyani et al. (2023) yang melaporkan bahwa bantuan sosial selain PKH tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap partisipasi sekolah. Perbedaan ini dapat mengisyaratkan bahwa efektivitas bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh jenis intervensi dan kelompok sasaran, di mana PKH tampaknya lebih tepat sasaran atau lebih memadai dalam mendukung keberlanjutan pendidikan dibandingkan program lainnya. Hal ini menegaskan perlunya perancangan program bantuan sosial yang lebih spesifik dan terarah agar dapat secara optimal meningkatkan akses dan partisipasi pada pendidikan tinggi.

Faktor-faktor selain KIP-K dan bantuan sosial lainnya tidak mempengaruhi partisipasi pendidikan tinggi. Fenomena ini menunjukkan kondisi ekonomi keluarga dan dukungan dari program bantuan pemerintah yang lebih mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan pendidikan (Cendikia, 2020). Misalnya, meskipun ada kesenjangan gender dalam prioritas pendidikan, tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar seringkali mendominasi keputusan pendidikan. Demikian pula, status perkawinan atau pekerjaan kepala rumah tangga mungkin tidak berpengaruh besar karena keluarga miskin lebih terfokus pada pemenuhan kebutuhan

finansial dasar daripada status atau pekerjaan kepala rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya kebijakan yang lebih fokus pada pemberian dukungan finansial yang lebih luas dan merata, serta meningkatkan akses dan kesadaran terhadap program pendidikan tinggi (Vianti & Fauziah, 2023).

SIMPULAN

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi bagi peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan ini berhasil mereduksi hambatan finansial yang kerap menjadi penghalang utama untuk melanjutkan studi. Kehadiran KIP-K mendorong siswa untuk lebih mampu mengakses pendidikan tinggi, sekaligus membantu menekan angka putus sekolah dan potensi ketimpangan sosial maupun ekonomi.

Program Keluarga Harapan (PKH) juga menunjukkan kontribusi yang berarti dalam mendorong keberlanjutan pendidikan ke jenjang tinggi. Penerima bantuan PKH memiliki kecenderungan lebih besar untuk melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan individu yang tidak memperoleh bantuan tersebut, menegaskan bahwa PKH efektif dalam mendukung pendidikan anak dari rumah tangga miskin.

SARAN

Penelitian mendatang dapat menelusuri lebih jauh peran kualitas pendidikan dasar dan menengah dalam memengaruhi partisipasi pada jenjang pendidikan tinggi. Apabila kualitas pada level pendidikan tersebut terbukti memiliki pengaruh yang kuat, maka peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dapat menjadi strategi kunci untuk memperluas akses ke pendidikan tinggi. Saran ini dapat menjadi masukan bagi peneliti berikutnya maupun rekomendasi implikatif yang berangkat dari temuan penelitian saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Becker, G. S. (2024). *HUMAN CAPITAL: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education* (Third Edition). The University of Chicago Press.
- BPS. (2022). *Statistik Pendidikan 2022*. Badan Pusat Statistik.
- Cendikia, D. G. (2020). Faktor Penentu Partisipasi Sekolah Anak Pada Rumah Tangga Sektor Pertanian Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15(2), 215–226.
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate* (Edisi 10). Universitas Diponegoro.
- Hosmer, D. W. ., Lemeshow, Stanley., & Sturdivant, R. X. . (2013). *Applied logistic regression*. Wiley.
- Kilburn, K., Handa, S., Angeles, G., Mvula, P., & Tsoka, M. (2017). Short-term impacts of an unconditional cash transfer program on child schooling: Experimental evidence from Malawi. *Economics of Education Review*, 59, 63–80. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2017.06.002>
- Kruger, D., Soares, R. R., & Berthelon, M. (2007). *Household Choices of Child Labor and Schooling: A Simple Model with Application to Brazil*.
- Madani, M. N., Faradila, N., & Rasyad, R. Z. (2025). Efektivitas Beasiswa Pendidikan Dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kalimantan Timur. In *Nusantara Innovation Journal* (Vol. 3, Issue 2).
- Maralani, V. (2008). The Changing Relationship Between Family Size And Educational Attainment Over The Course Of Socioeconomic Development: Evidence From Indonesia. *Demography*, 45(3), 693–717.
- Martins, E. K., & Toletina, N. T. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program KIP-K Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(1), 331–340.

- Mulyani, F., Ridwan, E., & Nazer, M. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar terhadap Partisipasi Sekolah di Kawasan Barat dan Timur Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 1328–1332. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i4.652>
- Nikmah, A. F., Tri Wardani, N., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah? *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2). www.journal.univetbantara.ac.id/index.php/komdik
- Nurokhmah. (2021). *Program Indonesia Pintar (PIP): Implementasi Kebijakan Kesejahteraan dalam Upaya Meningkatkan Angka Partisipasi Pendidikan* (Vol. 2, Issue 1).
- Okumu, I. M., Nakajjo, Alex, Isoke, & Doreen. (2008). *Socioeconomic determinants of primary school dropout: the logistic model analysis*.
- Putri, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiati, & Saputra, B. (2025). Evaluasi Implementasi Program Bantuan Pendidikan Di Indonesia: Analisis Efektivitas PIP, KIP Kuliah, Dan BOS Melalui Studi Literatur. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2, 1158–1165.
- Rohmah, E. N. L., & Kasmawanto, Z. (2022). Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah di Perguruan Tinggi Swasta. *MADANI: Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(1), 85–104.
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1, 238–251.
- Setyadharma, A. (2018). Government's Cash Transfers And School Dropout In Rural Areas. *JEJAK*, 11(2), 447–461. <https://doi.org/10.15294/jejak.v11i2.16125>
- Tullao, T. S., & Rivera, J. P. (2011). The Effects of Household Size and Other Factors on School Participation in Urban and Rural Households: Case of Pasay City and Eastern Samar in the Philippines. *9th Poverty and Economic Policy (PEP) Research Network Policy Conference*, 1–16.
- Utami, E. D., & Wicaksono, F. (2019). Determinan Partisipasi Sekolah Di Indonesia: Analisis Data Susenas Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah WIDYA Non-Eksakta*, 1(1), 68–73.
- Vianti, D. I., & Fauziah. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial Bersyarat Program Keluarga Harapan terhadap Partisipasi Pendidikan Anak Usia Sekolah di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 18(2). <https://doi.org/10.7454/jke.v18i2.1135>
- Yusup, Bambang Ismanto, & Wasitohadi. (2019). Evaluasi Program Indonesia Pintar dalam Peningkatan Akses Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1, 44–53.